

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas terhadap penguasaan Benda Milik Publik. Selain itu sejalan dengan diterapkannya titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, maka dalam penelitian ini dikaji pula mengenai pelaksanaan dari otonomi tersebut terutama yang berkaitan dengan penguasaan atas Benda Milik Publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif, dengan mengkaji norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku yang melandasi penguasaan terhadap Benda-benda Milik Publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas adalah wewenang Atribusi yang merupakan kewenangan asli yaitu kekuasaan terhadap Pengelolaan Alun-alun, Stadion dan Pasar Daerah dan wewenang Delegasi yang merupakan wewenang yang diperoleh dari hasil pelimpahan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemda Tingkat I, yaitu kekuasaan terhadap Taman, Tempat Wisata/Rekreasi, Terminal dan Tempat Parkir. Sedangkan wewenang Mandat yang sifatnya hanya merupakan pemberian kuasa belaka, digunakan untuk memperlancar tugas-tugas Kepala Daerah, dan dengan demikian tanggung jawab tetap ada pada Kepala Daerah.

Wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut dengan melakukan tindakan hukum baik tindakan hukum publik maupun privat. Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Benda Milik Publik adalah dengan menempatkannya dalam Peraturan Daerah yang didalamnya mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi hukum. Sedangkan tindakan hukum privat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 (1) dan Pasal 63 (3) c. UU No. 5 Tahun 1974 serta Perda Tingkat II Banyumas No. 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the kinds of authority which is possessed by Regency of Banyumas over public domein. In line with the autonomy that is focused on ythe Region level II, the research will analyse the implementation of that autonomy, expecially which is concerning with the authoriy of public property.

The method of this research is analitical descriptive by using legal approach. This method is done by analysing the norms or law regulation as the law basic of the authority of the public property.

The research that has been done shows that the authority of the Local Government of Banyumas has is Attribution authority. This authority is an original authority to manage the town square, sport stadium, and local market. The others authority the Local Government of Banyumas has is Delegation authority which is given both by the Central Government or Region Level I to manage the town park, tourist resort, public station and the parking park. Meanwhile the Mandate authority is a delegation of authority to speed up the local head works.

The authority of the Local Government will be implemented to do such law action both public or private. Public la action of Local Government over the public domein is governed by local legislation. In this way, Local Government of Banyumas has authority to manage the public domein both juridically or commercially (retribution). Meanwhile, the privat law action is based on the article 23 (1) and 63 (3) of the Law Number 5 Year 1974 and the Local Legislation Number 3 Year 1988.

Keyword : Authority
Publik Domein